



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DRS. H. MUSLIM, M.Pd.I  
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DRS. H. NOOR FAHMI, MM  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarmasin, September 2020

Pihak Kedua,

DRS. H. NOOR FAHMI, MM

Pihak Pertama,

DRS. H. MUSLIM, M.Pd.I



Perjanjian Kinerja Bagian Tata Usaha  
Tahun 2020

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

| Sasaran Strategis                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                        | Target |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| (1)                                                                                                  | (2)                                                                                                                      | (3)    |
| 1. Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum                                                   | 1. Persentase produk hukum yang diharmonisasikan                                                                         | 85 %   |
|                                                                                                      | 2. Persentase produk hukum yang diterbitkan                                                                              | 85 %   |
|                                                                                                      | 3. Persentase kasus hukum yang terselesaikan                                                                             | 50 %   |
|                                                                                                      | 4. Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan                                                                             | -      |
| 2. Meningkatnya kualitas pengelolaan kerjasama luar negeri                                           | 5. Persentase penyelesaian naskah kerjasama dan perjanjian internasional                                                 | 95 %   |
|                                                                                                      | 6. Persentase rekomendasi izin perjalanan dinas luar negeri                                                              | 92 %   |
|                                                                                                      | 7. Persentase rekomendasi izin orang asing                                                                               | 94 %   |
| 3. Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai) | 8. Jumlah dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja                                                     | 100 %  |
|                                                                                                      | 9. Jumlah laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditindaklanjuti | 95 %   |
|                                                                                                      | 10. Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan                                           | 10 %   |
|                                                                                                      | 11. Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)                                | 10 %   |
|                                                                                                      | 12. Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya                                                   | 20 %   |
|                                                                                                      | 13. Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu                                                                     | 95 %   |
|                                                                                                      |                                                                                                                          |        |



| Sasaran Strategis                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                   | Target     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (1)                                                                                | (2)                                                                                                                                 | (3)        |
|                                                                                    | 14. Persentase data ASN yang diupdate                                                                                               | 90 %       |
|                                                                                    | 15. Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses                                                 | 40 %       |
| 4. Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan | 16. Jumlah Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu                                          | 16 dokumen |
|                                                                                    | 17. Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)                                     | 92 %       |
|                                                                                    | 18. Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal                                                                          | 94,8 %     |
|                                                                                    | 19. Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama                                                                  | 30 %       |
|                                                                                    | 20. Persentase pencapaian dan penetapan target PNPB dan BLU                                                                         | 98 %       |
| 5. Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel                                     | 21. Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya                                       | 41,95 %    |
|                                                                                    | 22. Persentase tanah yang bersertifikat                                                                                             | 25,00 %    |
|                                                                                    | 23. Persentase nilai Opname Physic (OP) BMN                                                                                         | 95,00 %    |
| 6. Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi               | 24. Persentase satuan kerja yang telah ditindaklanjuti dengan perubahan organisasi                                                  | 75 %       |
|                                                                                    | 25. Jumlah dokumen perencanaan organisasi baru, pusat dan daerah yang diusulkan                                                     | 7 dokumen  |
|                                                                                    | 26. Persentase jabatan satuan kerja yang telah dievaluasi dan ditindaklanjuti dengan regulasi baru                                  | 85 %       |
|                                                                                    | 27. Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis | 70 %       |



| Sasaran Strategis                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                  | Target     |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (1)                                                                       | (2)                                                                                                                                | (3)        |
|                                                                           | 28. Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi                                                                   | 20 %       |
|                                                                           | 29. Jumlah standar pelayanan publik yang ditetapkan regulasinya                                                                    | 30 dokumen |
|                                                                           | 30. Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti                                                                  | 95 %       |
| 7. Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi                    | 31. Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi                                         | 80 %       |
|                                                                           | 32. Jumlah satuan kerja yang memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) | 1 satker   |
|                                                                           | 33. Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas                                                              | 13 satker  |
|                                                                           | 34. Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja                                                      | 6 orang    |
| 8. Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran                         | 35. Persentase output perencanaan yang berbasis data                                                                               | 90 %       |
|                                                                           | 36. Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra                                                                             | 90 %       |
|                                                                           | 37. Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti                                                                          | 70 %       |
| 9. Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran | 38. Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas                                                   | 93 %       |
|                                                                           | 39. Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti                | 70 %       |
|                                                                           | 40. Persentase kebijakan Prioritas Presiden dan Direktif Menteri yang dievaluasi                                                   | 85 %       |



| Sasaran Strategis                                                                              | Indikator Kinerja                                                                       | Target    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| (1)                                                                                            | (2)                                                                                     | (3)       |
| 10. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor                                          | 41. Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar                      | 60 %      |
| 11. Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa | 42. Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu                      | 90 %      |
|                                                                                                | 43. Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik                                   | 60 %      |
|                                                                                                | 44. Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen                                    | 75 %      |
|                                                                                                | 45. Persentase menurunnya lelang gagal                                                  | 70 %      |
|                                                                                                | 46. Persentase menurunnya sengketa dan sengketa banding                                 | 60 %      |
| 12. Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga                                      | 47. Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan                                         | 60 %      |
|                                                                                                | 48. Persentase penatausahaan dan penerbitan aset BMN di lingkungan Sekretariat Jenderal | 86,65 %   |
| 13. Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi                            | 49. Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi        | 247 %     |
|                                                                                                | 50. Jumlah pemberitaan negatif tentang Kemenag yang dicounter                           | 90 %      |
|                                                                                                | 51. Persentase opini positif berita                                                     | 75 %      |
| 14. Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi                                            | 52. Jumlah sistem informasi yang memenuhi standar                                       | 1 Unit    |
|                                                                                                | 53. Jumlah sistem informasi yang terintegrasi dalam MOS (Mora One Search)               | 1 unit    |
|                                                                                                | 54. Jumlah satuan kerja yang terhubung dalam satu jaringan dan internet                 | 14 satker |
|                                                                                                | 55. Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable                       | 60 %      |



## 2. Program Kerukunan Umat Beragama

| Sasaran Strategis                                                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                      | Target          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| (1)                                                                                                                                          | (2)                                                                                                    | (3)             |
| 15. Meningkatkan kualitas pelayanan perlindungan umat beragama                                                                               | 56. Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti                              | 100 %           |
|                                                                                                                                              | 57. Jumlah aktor kerukunan yang dibina                                                                 | 160 orang       |
|                                                                                                                                              | 58. Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina                                                            | 2 desa          |
| 16. Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa | 59. Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi | 6 lembaga/orang |
|                                                                                                                                              | 60. Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan                                       | 2 kegiatan      |
| 17. Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)                                                                                          | 61. Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP                                    | 96 %            |
| 18. Menguatnya dialog lintas agama dan budaya                                                                                                | 62. Jumlah diaog lintas agama dan budaya                                                               | 15 kegiatan     |

Program

Anggaran

Sekretariat Jenderal  
(Bagian Tata Usaha)

Rp. 45.363.764.000

Banjarmasin, September 2020

Kepala Kanwil Kementerian Agama  
Provinsi Kalimantan Selatan

DRS. H. NOOR FAHMI, MM  
NIP. 196503011998031002

Kepala Bagian Tata Usaha

DRS. H. MUSLIM, M.Pd.I  
NIP. 196307181994031001





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. AHMAD SYAUQI, S.Sos, MM  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DRS. H. MUSLIM, M.Pd.I  
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

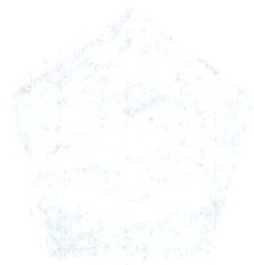
Banjarmasin, September 2020

Pihak Kedua,

DRS. H. MUSLIM, M.Pd.I

Pihak Pertama,

H. AHMAD SYAUQI, S.Sos, MM



GOVERNMENT OF INDIA

Ministry of Education  
New Delhi

1st April 1950

For the Government of India

Secretary to Government

Ministry of Education

For the Government of India  
New Delhi

For the Government of India

For the Government of India  
New Delhi

For the Government of India  
New Delhi

For the Government of India

For the Government of India

For the Government of India

Perjanjian Kinerja Sub Bagian Umum dan Humas pada Bagian Tata Usaha  
Tahun 2020

| Sasaran Strategis                                                                             | Indikator Kinerja                                                                      | Target  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| (1)                                                                                           | (2)                                                                                    | (3)     |
| 1. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor                                          | 1. Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar                      | 60 %    |
| 2. Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa | 2. Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu                      | 90 %    |
|                                                                                               | 3. Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik                                   | 60 %    |
|                                                                                               | 4. Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen                                    | 75 %    |
|                                                                                               | 5. Persentase menurunnya lelang gagal                                                  | 70 %    |
|                                                                                               | 6. Persentase menurunnya sengketa dan sengketa banding                                 | 60 %    |
| 3. Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga                                      | 7. Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan                                         | 60 %    |
|                                                                                               | 8. Persentase penatausahaan dan penertiban aset BMN di lingkungan Sekretariat Jenderal | 86,65 % |
| 4. Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi                            | 9. Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi        | 247 %   |
|                                                                                               | 10. Jumlah pemberitaan negatif tentang Kemenag yang dicounter                          | 90 %    |
|                                                                                               | 11. Persentase opini positif berita                                                    | 75 %    |

Banjarmasin, September 2020

Kepala Bagian Tata Usaha

DRS. H. MUSLIM, M.Pd.I  
NIP. 196307181994031001

Kepala Sub Bagian Umum dan  
Hubungan Masyarakat

H. AHMAD SYAUQI, S.Sos, MM  
NIP. 196702091989111001





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. RHOMA WIJAYA, S.H.I.  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan dan BMN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DRS. H. MUSLIM, M.Pd.I  
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarmasin, September 2020

Pihak Kedua,

DRS. H. MUSLIM, M.Pd.I

Pihak Pertama,

H. RHOMA WIJAYA, S.H.I.



Perjanjian Kinerja Sub Bagian Keuangan dan BMN  
Pada Bagian Tata Usaha Tahun 2020

| Sasaran Strategis                                                                  | Indikator Kinerja                                                                              | Target     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (1)                                                                                | (2)                                                                                            | (3)        |
| 1. Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan | 1. Jumlah Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu      | 16 dokumen |
|                                                                                    | 2. Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK) | 92 %       |
|                                                                                    | 3. Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal                                      | 94,8 %     |
|                                                                                    | 4. Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama                              | 30 %       |
|                                                                                    | 5. Persentase pencapaian dan penetapan target PNPB dan BLU                                     | 98 %       |
| 2. Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel                                     | 6. Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya   | 41,95 %    |
|                                                                                    | 7. Persentase tanah yang bersertifikat                                                         | 25,00 %    |
|                                                                                    | 8. Persentase nilai Opname Physic (OP) BMN                                                     | 95,00 %    |

Banjarmasin,     September 2020

Kepala Bagian Tata Usaha

DRS. H. MUSLIM, M.Pd.I  
NIP. 196307181994031001

Kepala Sub Bagian Keuangan  
Dan BMN

H. RHOMA WIJAYA, S.H.I.  
NIP. 197803122005011016





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. MUKHLIS RIDHANI, S.Ag. M.H  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Hukum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DRS. H. MUSLIM, M.Pd.I  
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarmasin, September 2020

Pihak Kedua,

DRS. H. MUSLIM, M.Pd.I

Pihak Pertama,

H. MUKHLIS RIDHANI, S.Ag. M.H



Perjanjian Kinerja Sub Bagian Kepegawaian dan Hukum  
Pada Bagian Tata Usaha Tahun 2020

| Sasaran Strategis                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                        | Target |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| (1)                                                                                                  | (2)                                                                                                                      | (3)    |
| 1. Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum                                                   | 1. Persentase produk hukum yang diharmonisasikan                                                                         | 85 %   |
|                                                                                                      | 2. Persentase produk hukum yang diterbitkan                                                                              | 85 %   |
|                                                                                                      | 3. Persentase kasus hukum yang terselesaikan                                                                             | 50 %   |
|                                                                                                      | 4. Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan                                                                             | -      |
| 2. Meningkatnya kualitas pengelolaan kerjasama luar negeri                                           | 5. Persentase penyelesaian naskah kerjasama dan perjanjian internasional                                                 | 95 %   |
|                                                                                                      | 6. Persentase rekomendasi izin perjalanan dinas luar negeri                                                              | 92 %   |
|                                                                                                      | 7. Persentase rekomendasi izin orang asing                                                                               | 94 %   |
| 3. Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai) | 8. Jumlah dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja                                                     | 100 %  |
|                                                                                                      | 9. Jumlah laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditandaklanjuti | 95 %   |
|                                                                                                      | 10. Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan                                           | 10 %   |
|                                                                                                      | 11. Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)                                | 10 %   |
|                                                                                                      | 12. Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya                                                   | 20 %   |
|                                                                                                      | 13. Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu                                                                     | 95 %   |
|                                                                                                      | 14. Persentase data ASN yang diupdate                                                                                    | 90 %   |

1. The first part of the paper is devoted to a general discussion of the problem of the existence of solutions of the system of equations

where  $x$  and  $y$  are vectors in the spaces  $X$  and  $Y$  respectively,  $F$  and  $G$  are mappings from  $X \times Y$  into  $X$  and  $Y$  respectively, and  $h$  is a mapping from  $X \times Y$  into  $X$ .

It is shown that if the mappings  $F$  and  $G$  satisfy certain conditions, then the system of equations has a unique solution.

2. In the second part of the paper, the problem of the existence of solutions of the system of equations

is considered, where  $x$  and  $y$  are vectors in the spaces  $X$  and  $Y$  respectively,  $F$  and  $G$  are mappings from  $X \times Y$  into  $X$  and  $Y$  respectively, and  $h$  is a mapping from  $X \times Y$  into  $X$ .

It is shown that if the mappings  $F$  and  $G$  satisfy certain conditions, then the system of equations has a unique solution.

3. In the third part of the paper, the problem of the existence of solutions of the system of equations

is considered, where  $x$  and  $y$  are vectors in the spaces  $X$  and  $Y$  respectively,  $F$  and  $G$  are mappings from  $X \times Y$  into  $X$  and  $Y$  respectively, and  $h$  is a mapping from  $X \times Y$  into  $X$ .

It is shown that if the mappings  $F$  and  $G$  satisfy certain conditions, then the system of equations has a unique solution.

4. In the fourth part of the paper, the problem of the existence of solutions of the system of equations

is considered, where  $x$  and  $y$  are vectors in the spaces  $X$  and  $Y$  respectively,  $F$  and  $G$  are mappings from  $X \times Y$  into  $X$  and  $Y$  respectively, and  $h$  is a mapping from  $X \times Y$  into  $X$ .

It is shown that if the mappings  $F$  and  $G$  satisfy certain conditions, then the system of equations has a unique solution.

5. In the fifth part of the paper, the problem of the existence of solutions of the system of equations

is considered, where  $x$  and  $y$  are vectors in the spaces  $X$  and  $Y$  respectively,  $F$  and  $G$  are mappings from  $X \times Y$  into  $X$  and  $Y$  respectively, and  $h$  is a mapping from  $X \times Y$  into  $X$ .

It is shown that if the mappings  $F$  and  $G$  satisfy certain conditions, then the system of equations has a unique solution.

6. In the sixth part of the paper, the problem of the existence of solutions of the system of equations

is considered, where  $x$  and  $y$  are vectors in the spaces  $X$  and  $Y$  respectively,  $F$  and  $G$  are mappings from  $X \times Y$  into  $X$  and  $Y$  respectively, and  $h$  is a mapping from  $X \times Y$  into  $X$ .

It is shown that if the mappings  $F$  and  $G$  satisfy certain conditions, then the system of equations has a unique solution.

7. In the seventh part of the paper, the problem of the existence of solutions of the system of equations

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja                                                                   | Target |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| (1)               | (2)                                                                                 | (3)    |
|                   | 15. Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses | 40 %   |

Banjarmasin, September 2020

Kepala Bagian Tata Usaha

DRS. H. MUSLIM, M.Pd.I  
NIP. 196307181994031001

Kepala Sub Bagian Kepegawaian  
Dan Hukum

H. MUKHLIS RIDHANI, S.Ag. M.H  
NIP. 197107172003121004

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HALIDAH, S.E.  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DRS. H. MUSLIM, M.Pd.I  
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarmasin, September 2020

Pihak Kedua,

DRS. H. MUSLIM, M.Pd.I

Pihak Pertama,

HALIDAH, S.E.



Perjanjian Kinerja Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi  
pada Bagian Tata Usaha Tahun 2020

| Sasaran Strategis                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                  | Target    |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| (1)                                                                       | (2)                                                                                                                | (3)       |
| 1. Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran                         | 1. Persentase output perencanaan yang berbasis data                                                                | 90 %      |
|                                                                           | 2. Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra                                                              | 90 %      |
|                                                                           | 3. Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti                                                           | 70 %      |
| 2. Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran | 4. Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas                                    | 93 %      |
|                                                                           | 5. Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti | 70 %      |
|                                                                           | 6. Persentase kebijakan Prioritas Presiden dan Direktif Menteri yang dievaluasi                                    | 85 %      |
| 3. Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi                        | 7. Jumlah sistem informasi yang memenuhi standar                                                                   | 1 Unit    |
|                                                                           | 8. Jumlah sistem informasi yang terintegrasi dalam MOS (Mora One Search)                                           | 1 unit    |
|                                                                           | 9. Jumlah satuan kerja yang terhubung dalam satu jaringan dan internet                                             | 14 satker |
|                                                                           | 10. Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable                                                  | 60 %      |

Banjarmasin, September 2020

Kepala Bagian Tata Usaha

DRS. H. MUSLIM, M.Pd.I  
NIP. 196307181994031001

Kepala Sub Bagian Perencanaan,  
Data dan Informasi

HALIDAH, S.E.  
NIP. 196607201989022001

For the purpose of this study, the following data were collected:

| Category   | Sub-category      | Value |
|------------|-------------------|-------|
| Category 1 | Sub-category 1.1  | 100   |
|            | Sub-category 1.2  | 200   |
|            | Sub-category 1.3  | 300   |
|            | Sub-category 1.4  | 400   |
|            | Sub-category 1.5  | 500   |
|            | Sub-category 1.6  | 600   |
|            | Sub-category 1.7  | 700   |
|            | Sub-category 1.8  | 800   |
|            | Sub-category 1.9  | 900   |
|            | Sub-category 1.10 | 1000  |
| Category 2 | Sub-category 2.1  | 1100  |
|            | Sub-category 2.2  | 1200  |
|            | Sub-category 2.3  | 1300  |
|            | Sub-category 2.4  | 1400  |
|            | Sub-category 2.5  | 1500  |
|            | Sub-category 2.6  | 1600  |
|            | Sub-category 2.7  | 1700  |
|            | Sub-category 2.8  | 1800  |
|            | Sub-category 2.9  | 1900  |
|            | Sub-category 2.10 | 2000  |
| Category 3 | Sub-category 3.1  | 2100  |
|            | Sub-category 3.2  | 2200  |
|            | Sub-category 3.3  | 2300  |
|            | Sub-category 3.4  | 2400  |
|            | Sub-category 3.5  | 2500  |
|            | Sub-category 3.6  | 2600  |
|            | Sub-category 3.7  | 2700  |
|            | Sub-category 3.8  | 2800  |
|            | Sub-category 3.9  | 2900  |
|            | Sub-category 3.10 | 3000  |

Category 1: 1000

Category 2: 2000

Category 3: 3000

Category 4: 4000

Category 5: 5000

Category 6: 6000

Category 7: 7000

Category 8: 8000



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. SUKRIANI, S.Pd, M.Pd, M.H.  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Ortala dan KUB

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DRS. H. MUSLIM, M.Pd.I  
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarmasin, September 2020

Pihak Kedua,

DRS. H. MUSLIM, M.Pd.I

Pihak Pertama,

Dr. SUKRIANI, S.Pd, M.Pd, M.H.



Perjanjian Kinerja Sub Bagian Ortala dan KUB  
Pada Bagian Tata Usaha Tahun 2020

| Sasaran Strategis                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                  | Target     |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (1)                                                                  | (2)                                                                                                                                | (3)        |
| 1. Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi | 1. Persentase satuan kerja yang telah ditindaklanjuti dengan perubahan organisasi                                                  | 75 %       |
|                                                                      | 2. Jumlah dokumen perencanaan organisasi baru, pusat dan daerah yang diusulkan                                                     | 7 dokumen  |
|                                                                      | 3. Persentase jabatan satuan kerja yang telah dievaluasi dan ditindaklanjuti dengan regulasi baru                                  | 85 %       |
|                                                                      | 4. Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis | 70 %       |
|                                                                      | 5. Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi                                                                    | 20 %       |
|                                                                      | 6. Jumlah standar pelayanan publik yang ditetapkan regulasinya                                                                     | 30 dokumen |
|                                                                      | 7. Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti                                                                   | 95 %       |
| 2. Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi               | 8. Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi                                          | 80 %       |
|                                                                      | 9. Jumlah satuan kerja yang memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)  | 1 satker   |
|                                                                      | 10. Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas                                                              | 13 satker  |
|                                                                      | 11. Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja                                                      | 6 orang    |



| Sasaran Strategis                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                      | Target          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| (1)                                                                                                                                         | (2)                                                                                                    | (3)             |
| 3. Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama                                                                               | 12. Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti                              | 100 %           |
|                                                                                                                                             | 13. Jumlah aktor kerukunan yang dibina                                                                 | 160 orang       |
|                                                                                                                                             | 14. Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina                                                            | 2 desa          |
| 4. Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa | 15. Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi | 6 lembaga/orang |
|                                                                                                                                             | 16. Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan                                       | 2 kegiatan      |
| 5. Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)                                                                                          | 17. Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP                                    | 96 %            |
| 6. Menguatnya dialog lintas agama dan budaya                                                                                                | 18. Jumlah diaog lintas agama dan budaya                                                               | 15 kegiatan     |

Banjarmasin, September 2020

Kepala Bagian Tata Usaha

DRS. H. MUSLIM, M.Pd.I  
NIP. 196307181994031001

Kepala Sub Bagian Ortala dan KUB

Dr. SUKRIANI, S.Pd, M.Pd, M.H.  
NIP. 197803152005011006

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

2048

2049

2050

2051

2052

2053

2054

2055

2056

2057

2058

2059

2060

2061